



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DWI SUKARMEI
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 742551

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 190 m2/180 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah Seluas 787 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 260.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. MOTOR, HONDA K1H03N1/BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 60.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.820.000.000

III. HUTANG Rp. 250.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.570.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



memenuhi kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SANENTO BUDHI SETYAWAN
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 765198

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	600.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 156 m2/140 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	9.000.000
1. MOTOR, HONDA Y1G02N02L0/SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	40.000.000
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	651.000.000

III. HUTANG Rp. 350.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 301.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **WORO PRATIWI SETYORINI**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **732689**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 535.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/130 m2 di KAB / KOTA KOTA MAGELANG , HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
2. Tanah Seluas 6052 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 210.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 194.750.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
2. MOTOR, HONDA ASTREA/C100 Tahun 1999, HASIL SENDIRI Rp. 4.750.000
3. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERTAHAP** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 17.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 746.750.000**III. HUTANG** Rp. 64.501.610**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 682.248.390

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RINAWATI HERI PRASTUTI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 765206

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.427.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 360 m2/200 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 1.200.000.000
2. Tanah Seluas 454 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 227.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 77.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOBIL, TOYOTA CITY CAR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 20.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 9.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.533.000.000

III. HUTANG Rp. 250.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.283.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



memenuhi kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ENDANG WURYANTI
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
3. NHK : 765173

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	50.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m2/220 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	12.000.000
1. MOTOR, VARIO HONDA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
2. MOTOR, VARIO HONDA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	2.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	65.000.000
III. HUTANG	Rp.	40.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	25.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TRI ASTUTI
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3. NHK : 801350

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	200.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/200 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	3.000.000
1. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	200.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	203.200.000
III. HUTANG	Rp.	64.782.690
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	138.417.310

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.